

## **BAB V**

### **ANALISIS**

Bab lima ini menjelaskan temuan dan analisis untuk menjawab rumusan masalah pada bab pertama tentang bagaimanakah efisiensi biaya konstruksi (*Fly over* Jombor, Jalan Titik 0 Km, dan Perpustakaan Grahatama) serta bagaimanakah hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi (*Fly over* Jombor, Jalan Titik 0 Km, dan Perpustakaan Grahatama) yang dibangun oleh pemerintah DIY. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa DIY merupakan daerah yang memiliki potensi tinggi baik dalam bidang pendidikan, pariwisata maupun budaya. Sebagai daerah yang banyak diminati oleh masyarakat baik untuk berlibur maupun menuntut ilmu tentunya akan berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya bagi masyarakat DIY itu sendiri, sehingga perlu dibangunnya fasilitas-fasilitas publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketiga konstruksi tersebut akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

#### **5.1 Laporan Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian mengenai analisis efisiensi biaya dan hasil (*outcome*) dalam pekerjaan konstruksi di DIY (Studi kasus : proyek pembangunan *fly over* Jombor, jalan titik 0 km dan perpustakaan Graha Tama) dilaksanakan pada Mei 2017 hingga Oktober 2017. Penelitian dilaksanakan dalam rangka untuk menganalisis efisiensi

biaya yang digunakan dalam pembangunan masing-masing konstruksi bangunan terkait dengan hasil pembangunan konstruksi tersebut untuk publik.

Peneliti dalam menganalisis biaya dan hasil (*outcome*) pekerjaan konstruksi jalan titik 0 km kota Yogyakarta yang dikerjakan oleh PT. Soyuren menggunakan beberapa data diantaranya adalah data biaya rekapitulasi pengerjaan konstruksi dari Bidang Bina Marga tahun 2015 meliputi biaya target pekerjaan konstruksi, biaya realisasi pekerjaan konstruksi dan efisiensi anggaran dalam rangka untuk mengevaluasi efisiensi biaya dalam pekerjaan konstruksi jalan titik 0 km. Selanjutnya peneliti menggunakan data pendukung berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM tahun 2016 dan wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga yaitu Bapak Bambang Sugaib, ST, MT dalam rangka mengevaluasi hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi jalan titik 0 km berupa manfaat, kesejahteraan dan keadilan bagi publik.

Selanjutnya peneliti dalam menganalisis biaya dan hasil (*outcome*) pekerjaan konstruksi *fly over* Jombor di kabupaten Sleman Yogyakarta yang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya menggunakan beberapa data diantaranya adalah data biaya rekapitulasi pengerjaan konstruksi dari sub bagian operasional Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM (PUP-ESDM) DIY yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2014 meliputi biaya kontrak total pengerjaan konstruksi *fly over* Jombor yang didukung dengan wawancara kepada PPK terkait waktu penyelenggaraan pembangunan konstruksi dalam rangka untuk mengevaluasi efisiensi biaya dalam pekerjaan konstruksi *fly over* Jombor. Selanjutnya peneliti menggunakan data

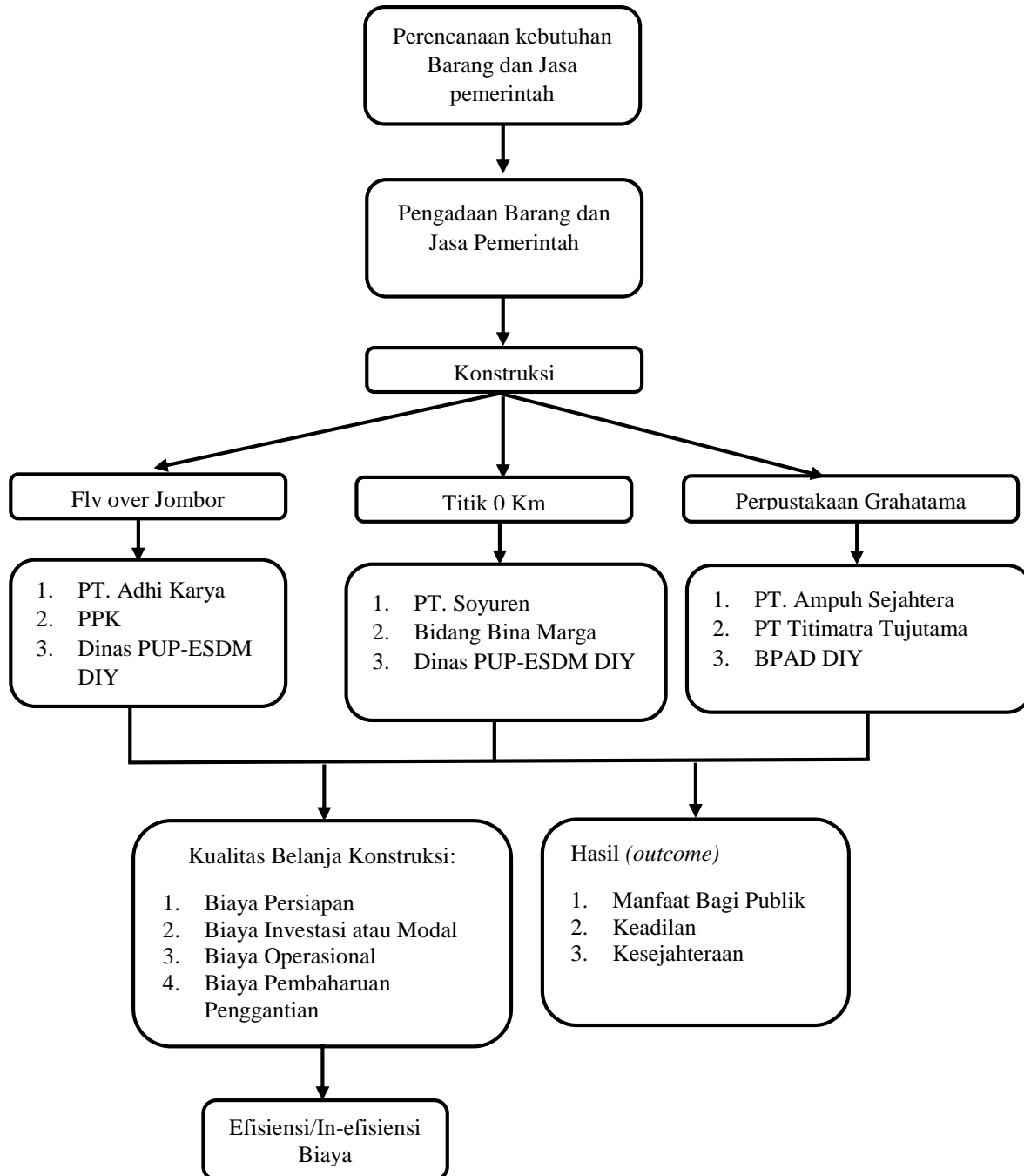
pendukung berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM tahun 2015 dan wawancara dengan Koordinator Lapangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Bapak Nur Badarudin dalam rangka mengevaluasi hasil (*outcome*) berupa manfaat bagi publik dari pekerjaan konstruksi *fly over* Jombor di kabupaten Sleman Yogyakarta dan wawancara dengan tiga dukuh yaitu dukuh Mlati, Jombor Lor dan Jombor Kidul dalam rangka mengevaluasi hasil (*outcome*) berupa kesejahteraan dan keadilan bagi publik terkait dengan pembangunan *fly over* Jombor.

Analisis biaya dan hasil (*outcome*) pekerjaan konstruksi perpustakaan Graha Tama di Kabupaten Bantul Yogyakarta oleh PT. Ampuh menggunakan beberapa data diantaranya adalah data biaya rekapitulasi pengerjaan konstruksi perpustakaan Graha Tama dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) tahun 2015 yang meliputi biaya perencanaan, pembangunan gedung tahap 1, penyelesaian pembangunan gedung, penataan kawasan (*landscape*), pengadaan sarana dan prasarana, dan peresmian gedung dalam rangka untuk mengevaluasi efisiensi biaya. Selanjutnya peneliti menggunakan data pendukung berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) tahun 2016 dan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) yaitu Ibu Agnes Riyanti D, SH dalam rangka mengevaluasi hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi perpustakaan Graha Tama di berupa manfaat, kesejahteraan dan keadilan bagi publik.

## **5.2 Hasil (*Outcome*) Pekerjaan Konstruksi**

Hasil (*outcome*) adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. *Outcome* juga berkaitan dengan tujuan atau target yang hendak dicapai dari sebuah program yang telah dilaksanakan (Anggraini; 2013). Program pembangunan konstruksi *fly over* Jombor, titik 0 km dan Perpustakaan Grahatama oleh pemerintah DIY merupakan salah satu bagian dari proses pengadaan barang dan jasa dimana proses tersebut dilakukan melalui sistem elektronik (*e-procurement*) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan untuk mengukur efisiensi biaya dari setiap konstruksi sehingga menghasilkan manfaat bagi publik (*outcome*) sebagaimana yang tertera pada bagan di bawah ini:

Gambar 5. 1 Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



Adapun indikator yang digunakan untuk menganalisis hasil (*outcome*) dalam penelitian ini terdiri dari manfaat bagi publik, kesejahteraan dan keadilan yang masing-masing dari indikator tersebut akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

#### 5.2.1 Hasil (*outcome*) Konstruksi *Fly over* Jombor

*Fly over* merupakan model jembatan layang yang dibangun diatas jalan. Pemerintah DIY membangun jembatan layang di daerah Jombor yang sering dikenal oleh masyarakat sebagai *Fly over* Jombor. Tujuan dari pembangunan *fly over* ini adalah untuk mengurangi masalah kemacetan di simpang 4 (empat) Jombor yang memiliki kepadatan lalu lintas tinggi terutama pada jam puncak yaitu waktu berangkat dan pulang sekolah maupun kerja. Semakin banyaknya jumlah kendaraan yang ada di jalan maka akan semakin sempit ruang gerak kendaraan untuk melintasi jalan. Hal ini mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan raya.

Selain itu simpang 4 (empat) Jombor tidak hanya sekedar akses jalur antar kota tetapi juga antar provinsi yaitu Magelang, Ambarawa, Salatiga, dan Semarang sehingga tingkat kemacetan di daerah tersebut sangat tinggi. Oleh sebab itu pembangunan *Fly over* Jombor sangat perlu dilakukan mengingat tingginya kemacetan di daerah tersebut.

### 5.2.1.1 Manfaat Bagi Publik

#### a. Mengurangi Tingkat Kemacetan

Masalah kemacetan lalu lintas seringkali terjadi pada kawasan yang mempunyai intensitas kegiatan dan penggunaan lahan yang tinggi. Selain itu, kemacetan lalu lintas terjadi karena volume lalu lintas tinggi yang disebabkan bercampurnya lalu lintas menerus (*through traffic*), lalu lintas regional dan lokal. Apabila sifat kemacetan lalu lintas tersebut merupakan suatu kejadian yang rutin, akibatnya bukan saja akan mempengaruhi inefisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga dapat mengganggu kegiatan di lingkungan yang ada. Selain itu, berdampak luas juga terhadap kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi.

Kemacetan adalah turunnya tingkat kelancaran arus lalu lintas pada jalan yang ada, dan sangat mempengaruhi para pelaku perjalanan, baik yang menggunakan angkutan umum maupun angkutan pribadi, hal ini berdampak pada ketidaknyamanan serta menambah waktu perjalanan bagi pelaku perjalanan (Margareth, Franklin, dan Warouw; 2015).

Peneliti dalam menganalisis hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi *Fly over Jombor* terkait dengan manfaat bagi publik yaitu dalam mengurangi tingkat kemacetan berdasarkan pada hasil wawancara dengan Koordinator

Lapangan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) yaitu Bapak Nur Badarudin yang terkutip di bawah ini :

*“Menurut Bapak, apakah setelah pekerjaan konstruksi fly over di Jombor terealisasi, tingkat kemacetan lalu lintas dapat berkurang ?”*  
*“Menurut saya, tingkat kemacetan lalu lintas di area fly over Jombor berkurang berdasarkan pengamatan dari tim kami yang meninjau langsung untuk survey tingkat kepadatan pengguna jalan baik roda dua maupu roda empat dengan menghitung jumlah kendaraan yang melintas di bawah fly over maupun melewati fly over setiap satu jam selama satu pekan terutama pada hari libur, dan tim kami mengatakan bahwa akses lalu lintas berjalan normal tanpa ada hambatan selanjutnya para pengendara kendaraan dapat mematuhi marka jalan dan lampu lalu lintas serta mematuhi pembatas jalan. Selanjutnya kami juga menyerahkan hasil uji survey kami tersebut pada Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan tujuan pembangunan konstruksi fly over Jombor sebagai salah satu realisasi program Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Lapangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan konstruksi *fly over* Jombor memiliki hasil (*outcome*) yaitu manfaat bagi publik dengan berkurangnya tingkat kemacetan lalu lintas.

Sedangkan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM tahun 2015 pada sasaran strategis yaitu meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang di dalamnya juga meliputi pembangunan konstruksi *fly over* Jombor diketahui telah mencapai kriteria penilaian realisasi keberhasilan sebesar 76,70 % (*tinggi*).



Pembangunan Konstruksi *Fly over* Jombor dalam rangka untuk mengurangi tingkat kemacetan memiliki kaitan dengan biaya kemacetan berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Perhubungan yaitu Ir. Gatot Saptadi melalui wawancara seperti yang ter kutip di bawah ini:

*“Apakah setelah pembangunan konstruksi fly over Jombor selesai dan berhasil mengurangi tingkat kemacetan akan memiliki kaitan dengan biaya kemacetan?”*

*“Tentunya dengan menurunnya angka kemacetan tersebut, berakibat pada perubahan biaya kemacetan dimana biaya tersebut berhubungan dengan kuantitas penggunaan Bahan Bakar Mesin (BBM) yang dirasakan oleh pengendara jalan serta tingkat keefektifan waktu dan jarak tempuhnya. Dengan menurunnya angka kemacetan, secara tidak langsung pengendara akan merasakan berkurangnya penggunaan BBM dan waktu mengendara serta jarak tempuh yang dituju menjadi lebih efektif”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan tersebut dikatakan bahwa pembangunan konstruksi *fly over* Jombor juga berdampak pada penurunan biaya kemacetan. Berhubungan dengan hal tersebut, peneliti juga memperoleh data tentang biaya kemacetan sebelum dan sesudah pembangunan konstruksi *fly over* Jombor yang terperinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1 Biaya Kemacetan Simpang Empat *Fly Over* Jombor Tahun 2010 dan 2015

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Biaya kemacetan (km/jam)		Biaya Total Kemacetan	
			2010	2015	2010	2015
1	Mobil Pribadi	200	Rp 2.900	Rp 1.700	Rp 580.000	Rp 340.000
2	Bus/Truk	200	Rp 7.264	Rp 6.064	Rp 1.452.800	Rp 1.212.000
3	Motor	400	Rp 1.800	Rp 600	RP 720.000	Rp 240.000
<b>TOTAL BIAYA KEMACETAN</b>					<b>Rp 2.752.800</b>	<b>Rp 1.792.000</b>

Sumber: Laporan Lalu Lintas Dinas Perhubungan DIY Tahun 2016 data telah diolah

Berdasarkan tabel biaya kemacetan di atas dapat disimpulkan bahwa biaya total kemacetan di area *Fly over* Jombor mengalami penurunan angka yaitu pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 2.752.800 menjadi Rp. 1.792.000 pada tahun 2015. Biaya total kemacetan tersebut dianalisa berdasarkan penghitungan jumlah total jenis kendaraan dikalikan dengan biaya kemacetan jenis kendaraan dalam km/jam dimana biaya tersebut bersumber dari data biaya kemacetan simpang empat *fly over* Jombor dari Dinas Perhubungan DIY.

b. Mengurangi Tingkat Polusi

Polusi udara merupakan sebuah kondisi dimana udara yang berada disekitar dicemari oleh zat-zat kimia seperti asap kendaraan bermotor sehingga dapat membahayakan pernafasan manusia. Pembangunan *Fly over* Jombor

yang memiliki tujuan untuk mengurangi kemacetan memiliki dampak positif bagi publik yaitu berkurangnya tingkat polusi udara.

Peneliti dalam menganalisis hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi *fly over* Jombor terkait dengan manfaatnya bagi publik yaitu dalam mengurangi tingkat polusi berdasarkan pada hasil wawancara dengan Koordinator Lapangan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) yaitu Bapak Nur Badarudin yang terkuip di bawah ini:

*“Berdasarkan pengamatan Bapak, apakah pengerjaan konstruksi fly over Jombor dapat mengurangi tingkat polusi udara?”*

*“Menurut saya, pengerjaan konstruksi Fly over Jombor mampu menekan tingkat polusi udara berdasarkan pengamatan dari tim survey kami dengan menggunakan CLJ (BII) sebagai alat pengukuran pencemaran udara berbasis mikrokontroler AT89S51 menggunakan sensor TGS 2600. Sistem terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras terdiri atas mikrokontroler AT89S51, sensor TGS 2600, Op-Amp, dan LCD sebagai penampilnya dan menghasilkan indeks sebesar 0,35 dan voltage sebesar 0,5 sehingga menghasilkan kategori bersih dari pencemaran udara. Selanjutnya hasil pengamatan dengan CLJ (BII) kami serahkan pada Dinas PU-ESDM DIY sebagai penyelenggara pekerjaan Konstruksi Fly over pada realisasi program pemberdayaan kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Lapangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan konstruksi *fly over* Jombor memiliki hasil (*outcome*) yaitu manfaat bagi publik dengan berkurangnya tingkat polusi udara.

Sedangkan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM tahun

2015 pada sasaran strategis yaitu meningkatnya kesesuaian pemanfaatan kawasan budidaya yang di dalamnya juga meliputi pembangunan konstruksi *fly over* Jombor diketahui telah mencapai kriteria penilaian realisasi keberhasilan sebesar 138,27% % (*sangat tinggi*).

Selain pernyataan Koordinator Lapangan PPK, dan data LAKIP Dinas PUP-ESDM tersebut, peneliti juga memperoleh data tentang biaya polusi udara sebelum dan sesudah pembangunan konstruksi *fly over* Jombor yang terperinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.2 Biaya Polusi Udara *Fly Over* Jombor Tahun 2010 dan 2015

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Biaya polusi udara (Rp/km)		Biaya Total Polusi udara	
			2010	2015	2010	2015
1	Mobil Pribadi	200	Rp 210	Rp 58	Rp 112.000	Rp 13.000
2	Bus/Truk	200	Rp 560	Rp 65	Rp 43.200	Rp 11.600
3	Motor	400	Rp 130	Rp 45	RP 52.000	Rp 18.000
<b>TOTAL BIAYA POLUSI</b>					<b>Rp 207.200</b>	<b>Rp 42.600</b>

Sumber: BPS (Jogja dalam Angka) Tahun 2016 data telah diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa biaya total polusi udara di area *Fly over* Jombor mengalami penurunan angka yaitu pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 207.200 menjadi Rp. 42.600 pada tahun 2015. Biaya total polusi udara tersebut dianalisa berdasarkan penghitungan jumlah total

jenis kendaraan dikalikan dengan biaya polusi udara dalam Rp/km dimana biaya tersebut bersumber dari data biaya polusi udara simpang empat *fly over* Jombor BPS (Jogja dalam Angka) tahun 2016. Hal ini berarti bahwa pembangunan *Fly over* Jombor yang memiliki tujuan untuk mengurangi kemacetan sehingga memiliki dampak positif bagi publik yaitu berkurangnya tingkat polusi udara.

### c. Keefektifan Jarak Tempuh

Jarak tempuh merupakan seberapa jauh jarak lokasi yang akan dituju dan waktu yang dibutuhkan untuk menuju lokasi tersebut. Peneliti dalam menganalisis hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi *fly over* Jombor terkait dengan manfaatnya bagi publik yaitu jarak tempuh menjadi lebih efektif juga berdasarkan pada hasil wawancara dengan Koordinator Lapangan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) yaitu Bapak Nur Badarudin yang ter kutip di bawah ini:

*“Menurut asumsi Bapak, apakah dengan dibangunnya konstruksi fly over Jombor jarak tempuh kemudi kendaraan baik roda dua maupun roda empat menjadi lebih efektif?”*

*“Berdasarkan pengamatan dari tim survei kami ke lapangan dalam rangka mengukur kecepatan lalu lintas dengan alat ukur berupa stop watch, meteran dan formulir survei serta pengukuran jumlah volume kendaraan dengan menggunakan Tally Counter, formulir survei serta meteran dengan jadwal survei dari pukul 06.30-12.30 WIB didapatkan hasil bahwa rata-rata kecepatan lalu lintas sebesar 2767,56 C yang berarti bahwa fly over Jombor mampu menampung*

*jumlah volume dan arus lalu lintas dengan lancar yang selanjutnya kami laporkan pada Dinas PU-ESDM DIY sebagai penyelenggara pekerjaan Konstruksi Fly over pada salah satu realisasi program Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Lapangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan konstruksi *fly over* Jombor memiliki hasil (*outcome*) yaitu manfaat bagi publik dengan keefektifan jarak tempuh bagi masyarakat yang melewati *fly over* Jombor.

Sedangkan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan - Energi dan Sumber Daya Manusia (PUP-ESDM) DIY tahun 2015 pada sasaran strategis yaitu meningkatnya kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang di dalamnya juga meliputi pembangunan konstruksi *fly over* Jombor diketahui telah mencapai kriteria penilaian realisasi keberhasilan sebesar 76,70 % (*tinggi*).

Pembangunan konstruksi *fly over* Jombor selain memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar konstruksi (Muhammad, Pambudi dan Subarkah; 2015) seperti dampak sosial yakni:

a. Renggangnya Interaksi Antar Warga

Warga sekitar mengeluhkan adanya tembok *flyover* yang memisahkan antara sisi barat dan sisi timur dari padukuhan Jombor Lor sehingga warga

merasa tidak memiliki masjid lagi. Hal ini karena masjid yang berada di sisi barat menjadi sulit untuk dijangkau karena adanya tembok dari *fly over* yang menyulitkan warga untuk menyeberang. Selain itu dampak lain dari tembok ini juga menyebabkan interaksi antar warga di barat dan timur menjadi berkurang sehingga banyak warga di sebelah timur yang tidak datang saat terjadi perkumpulan organisasi seperti PKK terutama untuk ibu-ibu lansia.

b. Kebisingan Suara

Pada masa pembangunan, banyak warga mengeluh tentang kebisingan dari alat-alat berat yang digunakan dan proyek tersebut terkadang dilanjutkan pembangunannya hingga larut malam yakni sampai pukul 02.00 WIB. Selanjutnya, rumah warga juga secara fisik mengalami retak-retak karena getaran dari alat-alat pembangunan dan genteng banyak yang pecah terutama rumah warga di dekat pembangunan *fly over* Jombor.

c. Degradasi Lingkungan di Sekitar *Fly Over*

Kondisi lingkungan sekitar warga juga semakin buruk karena banyaknya debu yang terjadi selama pembangunan yakni timbulnya debu yang mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Selanjutnya, warga juga mengeluhkan akan adanya lahan parkir yang sempit.

### 5.2.1.2 Kesejahteraan

Pembangunan konstruksi maupun fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah memiliki dampak bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampak dari pembangunan konstruksi oleh pemerintah adalah pada kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan perekonomian masyarakat.

Peneliti dalam menganalisis hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi *fly over* Jombor terkait dengan kesejahteraan yaitu meningkatkan pendapatan UMKM berdasarkan pada hasil wawancara dengan tiga dukuh yaitu Dukuh Mlati Bapak Sugeng Wijoyo, Jombor Lor Bapak Armunandar dan Jombor Kidul Bapak Suwardiyono selaku masyarakat yang merasakan secara langsung dari dampak pembangunan konstruksi *fly over* yang terkutip di bawah ini :

*“Menurut Bapak sekalian, apakah setelah pekerjaan konstruksi fly over di Jombor terealisasi dapat meningkatkan pendapatan UMKM pada masyarakat di perdukahan masing-masing ?”*

*“Berdasarkan diskusi kami dengan beberapa pengusaha UMKM di sekitar area fly over Jombor, rata-rata mereka mengatakan terjadi peningkatan penghasilan per hari terutama pada saat hari libur biasa dan hari libur nasional dimana banyak para pengendara roda dua atau roda empat yang menggunakan jasa penyediaan makanan dan minuman, bensin eceran, obat-obatan, helm, kacamata, masker, beberapa kerajinan kayu, rotan, dan lain-lain. Selanjutnya kami juga melaporkan hasil kenaikan UMKM pada kelurahan dengan harapan dapat sampai ke pemerintah kabupaten dan kota hingga Provinsi untuk menghasilkan laporan tentang peningkatan penyelenggaraan UMKM terkait dengan pembangunan konstruksi fly over Jombor.”*



Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pembangunan konstruksi *fly over* Jombor memiliki hasil (*outcome*) yaitu kesejahteraan berupa kenaikan hasil UMKM masyarakat sekitar dengan diadakannya pembangunan konstruksi *fly over* Jombor.

Selain berdasarkan hasil wawancara diatas, terkait dengan masalah kenaikan hasil pendapatan UMKM masyarakat Jombor juga terdapat pada hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan - Energi dan Sumber Daya Manusia (PUP-ESDM) DIY tahun 2015 yang terdapat pada sasaran strategis yaitu meningkatnya akses energi berupa produktifitas masyarakat terkait dengan pembangunan konstruksi *fly over* Jombor diketahui telah mencapai kriteria penilaian realisasi keberhasilan sebesar 94% (*sangat tinggi*).

Selanjutnya, peneliti dalam menganalisis peningkatan pendapatan UMKM juga menggunakan data pendukung atau sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman tahun 2010 dan 2015 dalam rangka menilai laju pertumbuhan UMKM sebelum dan sesudah pembangunan konstruksi *Fly over* Jombor yang terperinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.3 Laju Pertumbuhan UMKM Sebelum dan Sesudah Pembangunan Konstruksi *Fly over* Jombor

No	Konstruksi	Tahun		Laju Pertumbuhan UMKM (Rp)	Laju Pertumbuhan UMKM (%)
		2010	2015		
1	Fly Over Jombor	Rp.2.388.999	Rp.3.255.739	Rp. 866.740	(0.7%)

Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2014 dan 2016 Data telah diolah

Berdasarkan Tabel V.3 diatas, BPS Kabupaten Sleman tahun 2010 dinyatakan bahwa sebelum pembangunan fly over memiliki nilai UMKM sebesar Rp. 2.388.999 sedangkan setelah pembangunan fly over nilai UMKM bertambah menjadi Rp. 3.255.739 pada tahun 2015. Hal ini berarti bahwa pembangunan fly over Jombor memiliki dampak positif bagi laju pertumbuhan nilai UMKM sebesar Rp. 866.740 (0.7%) dalam jangka waktu 5 tahun.

#### 5.2.1.3 Keadilan

Keadilan berkaitan dengan siapa saja yang diperbolehkan untuk mengakses dan menggunakan jalan raya yang dibangun oleh pemerintah guna pemenuhan kebutuhan masyarakat tanpa membeda-bedakan. Peneliti dalam menganalisis hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi *fly over* Jombor terkait dengan keadilan yaitu meningkatnya aksesibilitas jalan berdasarkan pada hasil wawancara dengan Koordinator Lapangan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) yaitu Bapak Nur Badarudin yang ter kutip di bawah ini:

*“Berdasarkan pengamatan Bapak, apakah aksesibilitas jalan di sekitar fly over Jombor mengalami peningkatan ?”*

*“Berdasarkan pengamatan saya melalui tim survei kami ke lapangan dalam rangka mengetahui ukuran tata guna lahan satu dengan yang lainnya serta sulit atau tidaknya lokasi fly over Jombor yang dicapai sistem jaringan transportasi, kami menggunakan model Gravity untuk mengukur aksesibilitas jalan pada jarak jauh atau jarak dekat berdasarkan kondisi prasarana yang dicapai dimana pada aksesibilitas jarak jauh dan dekat dikatakan sangat baik atau memiliki indeks aksesibilitas yang tinggi sebesar 1,00 dengan kategori sangat tinggi dan sebagai tanggungjawab kami dalam mengelola serta mengkoordinasi kondisi lapangan sekitar fly over Jombor, kami menyerahkan hasil laporan mengenai tingkat aksesibilitas jalan tersebut pada Dinas (PU-ESDM) DIY sebagaimana keterkaitannya dengan program atau sarasannya pada peningkatan aksesibilitas jalan di wilayah Provinsi.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Lapangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan konstruksi *fly over* Jombor memiliki hasil (*outcome*) yaitu keadilan berupa meningkatnya aksesibilitas jalan.

Sedangkan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM tahun 2015 pada sasaran strategis yaitu meningkatnya aksesibilitas jalan di wilayah provinsi yang didalamnya juga meliputi pembangunan konstruksi *fly over* Jombor diketahui telah mencapai kriteria penilaian realisasi keberhasilan sebesar 106,84 % (*sangat tinggi*).

### 5.2.2 Hasil (*Outcome*) Konstruksi Titik 0 Km

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang menjadi tujuan destinasi wisata baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Malioboro merupakan salah satu tempat yang banyak sekali didatangi oleh wisatawan sehingga sering terjadi kemacetan di sekitar lokasi tersebut. Lokasi yang menjadi pusat perhatian bagi wisatawan adalah kawasan titik 0 km.

Titik 0 km merupakan pusat kota Yogyakarta di mana disekitar kawasan tersebut terdapat banyak bangunan-bangunan bersejarah yang sampai saat ini masih terawat dan masih digunakan. Titik 0 km juga menghubungkan area ekonomi, perdagangan, wisata, serta pendidikan. Kegiatan-kegiatan yang banyak dilakukan di Kawasan Titik 0 Km akan berdampak pada padatnya lalu lintas di kawasan tersebut yang mengakibatkan kemacetan. Untuk mengatasi masalah tersebut kemudian pemerintah DIY merevitalisasi titik nol Km yang bertujuan untuk kelancaran lalulintas dikawasan tersebut.

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa manfaat dari pembangunan revitalisasi tersebut. Jika dilihat secara langsung jalan di perempatan titik 0 km tampak berbeda dengan jalan pada umumnya yang di lapiasi dengan aspal, namun perempatan titik nol km pada bagian permukaanya dibangun menggunakan batu andesit yang bertujuan untuk memperlambat laju kendaraan dan kelancaran lalulintas. Untuk mengetahui *outcome* dari revitalisasi kawasan titik 0 km akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

### 5.2.2.1 Manfaat Bagi Publik

#### a. Mengurangi Tingkat Kemacetan

Kemacetan merupakan sebuah kondisi dimana banyaknya jumlah kendaraan yang ada di jalan namun tidak berbanding lurus dengan ketersediaan jalan yang ada. Hal ini sering terjadi pada daerah yang memiliki potensi wisata yang tinggi seperti Yogyakarta sehingga banyak wisatawan yang datang berkunjung untuk berwisata.

Peneliti dalam menganalisis hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi Titik 0 Km terkait dengan manfaatnya bagi publik yaitu dalam mengurangi tingkat kemacetan berdasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga yaitu Bapak Bambang Sugaib, ST, MT yang ter kutip di bawah ini:

*“Menurut Bapak, apakah setelah pekerjaan konstruksi titik 0 km terealisasi, tingkat kemacetan lalu lintas dapat berkurang ?”*

*“Menurut saya, dalam rangka mengurangi tingkat kemacetan di area Titik 0 km, kami perlu menerapkan revitalisasi lalu lintas dan rekayasa jalan. Terkait dengan hal tersebut, tim kami telah meninjau langsung untuk survey tingkat kepadatan pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat dengan menghitung jumlah kendaraan yang melintas di kawasan titik 0 km setiap satu jam selama empat pekan dan tim kami mengatakan bahwa akses lalu lintas berjalan normal dan para pengendara dapat mematuhi marka jalan dan lampu lalu lintas serta mematuhi pembatas jalan. Di satu sisi, konstruksi diameter jalan radial di tengah sengaja kami desain dalam bentuk melengkung sehingga dapat mengurangi laju kecepatan kemudi para pengendara jalan alhasil tingkat kemacetan dapat dikurangi sedini mungkin. Hasil uji survey kami tersebut sebagai laporan kami pada Dinas PU-ESDM DIY terkait dengan tujuan pembangunan konstruksi titik 0 km sebagai salah satu realisasi program Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga tersebut, dapat menunjukkan bahwa pembangunan konstruksi titik 0 km memiliki hasil (*outcome*) yaitu manfaat bagi publik dengan berkurangnya tingkat kemacetan lalu lintas.

Sedangkan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM tahun 2016 pada sasaran strategis yaitu meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang di dalamnya juga meliputi pembangunan konstruksi titik 0 km diketahui telah mencapai kriteria penilaian realisasi keberhasilan sebesar 77,77 % (*tinggi*).

Pembangunan konstruksi Titik 0 Km dalam rangka mengurangi tingkat kemacetan juga berdasarkan pada pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Ir. Gatot Saptadi melalui wawancara seperti yang ter kutip di bawah ini:

*“Apakah setelah pembangunan konstruksi titik 0 km tersebut selesai dan berhasil mengurangi tingkat kemacetan akan memiliki kaitan dengan biaya kemacetan?”*

*“Saya rasa, dengan menurunnya angka kemacetan di kawasan titik 0 km tersebut akan berakibat pada perubahan biaya angka kemacetan dimana biaya tersebut berhubungan dengan kuantitas penggunaan Bahan Bakar Mesin (BBM) yang dirasakan oleh pengendara jalan serta tingkat keefektifan waktu dan jarak tempuhnya. Dengan menurunnya angka kemacetan, secara tidak langsung pengendara akan merasakan berkurangnya penggunaan BBM dan waktu mengemudi serta jarak tempuh yang dituju menjadi lebih efektif”.*

Selain pernyataan Kepala Bidang Bina Marga, data LAKIP Dinas PUP-ESDM 2016, dan Kepala Dinas Perhubungan tersebut, peneliti juga

memperoleh data tentang biaya kemacetan sebelum dan sesudah pembangunan konstruksi titik 0 km yang terperinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4 Biaya Kemacetan Simpang Empat Titik 0 Km Tahun 2014 dan 2016

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Biaya kemacetan (km/jam)		Biaya Total Kemacetan	
			2014	2016	2014	2016
1	Mobil Pribadi	200	Rp 4.400	Rp 3.900	Rp 880.000	Rp 780.000
2	Bus/Truk	200	Rp 8.764	Rp 8.164	Rp 1.752.800	Rp 1.632.800
3	Motor	400	Rp 3.300	Rp 2.700	RP 1.320.000	Rp 1.080.000
<b>TOTAL BIAYA KEMACETAN</b>					<b>Rp 3.952.000</b>	<b>Rp 3.492.800</b>

Sumber: Laporan Lalu Lintas Dinas Perhubungan DIY Tahun 2016 data telah diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa biaya total kemacetan di area Titik 0 km mengalami penurunan angka yaitu pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 3.952.000 menjadi Rp. 3.492.800 pada tahun 2016. Biaya total kemacetan tersebut dianalisa berdasarkan penghitungan jumlah total jeis kendaraan dikalikan dengan biaya kemacetan jenis kendaraan dalam km/jam dimana biaya tersebut bersumber dari data biaya kemacetan simpang empat titik 0 km dari Dinas Perhubungan DIY.

## b. Mengurangi Angka Kecelakaan

Permasalahan serius yang dihadapi oleh kota-kota besar seperti Yogyakarta salah satunya adalah masalah kecelakaan lalu lintas. Keadaan ini merupakan sebuah bukti dari berkembangnya teknologi modern yang terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun semakin meningkat baik itu roda dua maupun roda empat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi seperti kondisi jalan yang berakibat pada kecelakaan lalu lintas. Revitalisasi kawasan titik 0 km merupakan salah satu proyek pemerintah yang memiliki tujuan salah satunya adalah untuk mengurangi angka kecelakaan yang sering terjadi di simpang jalan tersebut.

Peneliti dalam menganalisis hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi Titik 0 Km terkait dengan manfaatnya bagi publik yaitu dalam mengurangi angka kecelakaan berdasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga yaitu Bapak Bambang Sugaib, ST, MT yang ter kutip di bawah ini:

*“Berdasarkan pengamatan Bapak, apakah setelah pekerjaan konstruksi titik 0 km terealisasi, angka kecelakaan lalu lintas dapat berkurang ?”*

*“Menurut saya, angka kecelakaan lalu lintas di area Titik 0 Km berkurang berdasarkan hasil survey dari tim polisi lalu lintas kota Yogyakarta sebagai rekan kerja pelaksanaan di lapangan yang mana berdasarkan alat ukur berupa speed gun sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 tahun 2015 Pasal 3 Ayat 4 untuk mengukur kecepatan laju lalu lintas ditetapkan bahwa batas kecepatan para pengendara adalah sebesar 50 km per jam untuk dalam kota dan rata-rata laju kecepatan para*



*pengendara roda dua ataupun roda empat di sekitar area titik 0 km sebesar 40 hingga 50 km per jam. Hal ini akan membuat kestabilan laju lalu lintas di sekitar area titik 0 km sehingga angka kecelakaan dapat dicegah.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan konstruksi titik 0 km memiliki hasil (*outcome*) yaitu manfaat bagi publik dengan berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas.

Sedangkan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM tahun 2016 pada sasaran strategis yaitu meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang di dalamnya juga meliputi pembangunan konstruksi titik 0 km diketahui telah mencapai kriteria penilaian realisasi keberhasilan sebesar 137,69 % (*sangat tinggi*).

Selain itu, berdasarkan data yang ada di buku laporan “Jogja Dalam Angka” Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta Tahun 2014 dan 2016 menunjukkan bahwa ada penurunan angka kecelakaan di wilayah Malioboro yang terangkum dalam tabel dan grafik dibawah ini:

Tabel 5.5 Angka Kecelakaan Di Wilayah Malioboro Sebelum Dan Sesudah Revitalisasi Titik 0 Km Tahun 2014 Dan 2016

Jenis Kecelakaan	Tahun	
	2014	2016
Jumlah Kecelakaan	678	491
Kerugian Materi	672.766	582.200

Sumber: (BPS) Jogja Dalam Angka Tahun 2015 Data Telah Diolah

Berdasarkan tabel 5.5 dan grafik 5.1 diatas, menunjukkan bahwa angka kecelakaan di wilayah Malioboro berkurang, dimana di tahun 2014 jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 673 jenis kecelakaan dan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 672.766 sedangkan di tahun 2016 jumlah kecelakaan sebanyak 491 dan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 582.200. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya revitalisasi Titik 0 Km dengan design yang melengkung pada bagian tengah dan memiliki lapisan yang terbuat dari batu andesit memiliki dampak pada pengurangan tingkat kecelakaan di wilayah tersebut.

#### c. Meningkatnya Kelayakan Sanitasi

Sanitasi merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subyeknya seperti menyediakan air yang bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah untuk mewedahi sampah agar tidak dibuang sembarangan (Depkes RI, 2004).

Peneliti dalam menganalisis hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi Titik 0 Km terkait dengan manfaatnya bagi publik yaitu dalam meningkatnya kelayakan sanitasi berdasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga yaitu Bapak Bambang Sugaib, ST, MT yang ter kutip di bawah ini:

*“Menurut Bapak, apakah setelah pekerjaan konstruksi titik 0 km terealisasi, kelayakan sanitasi dapat meningkat ?”*

*“Setelah pengerjaan konstruksi titik 0 km selesai, kami melihat bahwa akses sanitasi dapat berjalan dengan baik dimana air limbah tidak mencemari kawasan titik 0 km dan mengalir pada gorong-gorong sebagai drainase utama di sekitar jalan. Tim pelaksana lapangan yang kami terjunkan untuk mengamati sistem drainase air limbah di sekitaran kawasan titik 0 km juga menyatakan bahwa hingga saat ini belum pernah terjadi banjir pada saat hujan turun dan aliran air mengalir pada pipa drainase di sekitar titik 0 km dengan lancar.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan konstruksi titik 0 km memiliki hasil (*outcome*) yaitu manfaat bagi publik dengan meningkatnya kelayakan sanitasi.

Sedangkan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM tahun 2016 pada sasaran strategis yaitu meningkatnya meningkatnya akses sanitasi yang layak yang di dalamnya juga meliputi pembangunan konstruksi titik 0 km diketahui telah mencapai kriteria penilaian realisasi keberhasilan sebesar 104,61% (*sangat tinggi*).

Selain pernyataan Kepala Bidang Bina Marga, dan data LAKIP Dinas PUP-ESDM tersebut, kelayakan sanitasi juga diukur dari Biaya Kelayakan sanitasi. Berdasarkan laporan akhir, garis besar strategi manajemen limbah cair di Kota Yogyakarta tahun 2016, didapatkan data tentang biaya kelayakan sanitasi sebelum dan sesudah pembangunan konstruksi titik 0 km yang terperinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.6 Biaya Kelayakan sanitasi Kota Yogyakarta tahun 2014 dan 2016

No	Kategori	Biaya Manajemen Limbah	
		2014	2016
1	Jaringan Pembuangan Limbah	Rp 312.000.000	Rp 352.000.000
2	Subsidi Pemerintah	Rp.38.000.000	Rp. 1.000.000.000

Sumber: Laporan Akhir, Garis Besar Strategi Manajemen Limbah Cair di Kota Yogyakarta dan sekitarnya, tahun 2016, USAID data telah diolah

Salah satu tolak ukur atau indikator dari layaknya sanitasi ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah sambungan saluran limbah, maka subsidi pemerintah dalam membiayai pelaksanaan peningkatan sambungan saluran limbah juga meningkat.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa biaya manajemen limbah di 0 km mengalami peningkatan subsidi dari pemerintah kota yogyakarta yakni pada tahun 2014 sebesar Rp.38.000.000 dan Rp. 1.000.000.000 di tahun 2016. Sedangkan biaya jaringan pembuangan limbah juga mengalami peningkatan yakni pada tahun 2014 sebesar Rp 312.000.000 dan Rp 352.000.000

pada tahun 2016. Hal ini berarti bahwa pemerintah kota Yogyakarta dalam membangun konstruksi Titik 0 km telah memenuhi unsur upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan masyarakat yaitu dengan menciptakan pemeliharaan sanitasi di sekitar kawasan Titik 0 km.

Pembangunan konstruksi Titik 0 km selain memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar konstruksi menurut Lufityanti (2017), yaitu membuat lingkungan menjadi kurang bersih. Banyaknya sampah di beberapa lubang yang berbentuk kotak pada batu andesit di sekitar Titik Nol Kilometer sangat mengganggu warga dan wisatawan. Sampah tersebut merupakan sisa-sisa bungkus makanan dari pedagang. Kondisi ini membuat lingkungan sekitar 0 km menjadi kurang bersih dan dapat menimbulkan penyakit.

#### 5.2.2.2 Kesejahteraan

Revitalisasi kawasan titik 0 km merupakan program pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi DIY yang memiliki tujuan untuk memperindah kawasan tersebut karena banyak wisatawan yang tidak mengetahui ataupun menyadari keberadaan dari titik 0 km yang merupakan pusat Kota Yogyakarta. Pembangunan Revitalisasi kawasan Titik 0 km mampu menarik perhatian wisatawan, sehingga berdampak pada pendapatan UMKM dari masyarakat yang memiliki usaha di sekitar kawasan tersebut.

Peneliti dalam menganalisis hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi titik 0 km terkait dengan kesejahteraan yaitu dalam meningkatkan pendapatan UMKM berdasarkan pada hasil wawancara dengan salah satu pelaku UMKM makanan yaitu Bapak Ngadiman disekitar kawasan titik 0 km terkait dengan peningkatan pendapatan hasil UMKM yang terkuip di bawah ini :

*“Bagaimana menurut Bapak terkait dengan hasil pendapatan usaha makanan bapak setelah pekerjaan konstruksi titik 0 km selesai dilakukan dan apakah Bapak juga melaporkan hasil UMKM Bapak pada staf atau karyawan pajak daerah tiap ada survey ?”*

*“setelah pengerjaan konstruksi titik 0 km selesai, penghasilan UMKM makanan saya mengalami peningkatan sekitar 30-50% dari sebelum dibangunnya konstruksi titik 0 km. Saya juga melaporkan hal ini pada staff pajak UMKM apabila ada survey karena hal ini untuk keperluan pendataan pemerintah terkait dengan peningkatan ekonomi bagi kami selaku UMKM sehubungan dengan pengerjaan konstruksi titik 0 km.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ngadiman selaku pengusaha UMKM makanan maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan konstruksi titik 0 km memiliki hasil (*outcome*) yaitu kesejahteraan berupa kenaikan hasil UMKM masyarakat di sekitar titik 0 km.

Sedangkan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM tahun 2016 pada sasaran strategis yaitu meningkatnya akses energi berupa produktifitas masyarakat terkait dengan pembangunan konstruksi titik 0 km diketahui telah mencapai kriteria penilaian realisasi keberhasilan sebesar 101,43 (*sangat tinggi*).

Peneliti dalam menganalisis hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi titik 0 km terkait dengan kesejahteraan yaitu dalam meningkatkan pendapatan UMKM juga menggunakan data pendukung atau sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta tahun 2014 dan 2016 dalam rangka menilai laju pertumbuhan UMKM sebelum dan sesudah pembangunan konstruksi titik 0 km yang terperinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.7 Laju Pertumbuhan UMKM Sebelum dan Sesudah Pembangunan Konstruksi Titik 0 Km

No	Konstruksi	Tahun		Laju Pertumbuhan UMKM (Rp)	Laju Pertumbuhan UMKM (%)
		2014	2016		
1	Titik 0 Km	Rp.1.674.189	Rp. 1.783.819	Rp. 109.630	(0.9%)

Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2014 dan 2016 Data telah diolah

Berdasarkan Tabel 5.7 diatas, BPS Kota Yogyakarta tahun 2014 dinyatakan bahwa sebelum pembangunan titik 0 km memiliki nilai UMKM sebesar Rp. 1.674.189 sedangkan setelah pembangunan titik 0 km nilai UMKM bertambah menjadi Rp. 1.783.819 pada tahun 2016. Hal ini berarti bahwa pembangunan titik 0 km memiliki dampak positif bagi laju pertumbuhan nilai UMKM sebesar Rp. 109.630 (0.9%) dalam jangka waktu 2 tahun.

### 5.2.2.3 Keadilan

Keadilan adalah sebuah kondisi dimana setiap orang ataupun individu berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses dan menggunakan fasilitas publik. Titik 0 km merupakan sebuah titik yang menjadi pedoman penentuan jarak antar daerah atau kota-kota lain dari luar Yogyakarta. Di kawasan tersebut semua jenis kendaraan dapat melintasi dan menggunakan jalan tersebut seperti anding, busm sepeda motor, dan kendaraan lainnya kecuali Truk-truk dengan muatan besar karena akan menghambat lalu lintas.

Peneliti dalam menganalisis hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi titik 0 km terkait dengan keadilan yaitu semua kendaraan dapat menggunakan jalan, berdasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga yaitu Bapak Bambang Sugaib, ST, MT yang ter kutip di bawah ini:

*“Berdasarkan pengamatan Bapak, apakah semua kendaraan dapat menggunakan dan melintasi titik 0 km ?”*

*“Berdasarkan pengamatan saya, setelah pembangunan konstruksi titik 0 km selesai kami melakukan rekayasa jalan pada jam-jam tertentu dan meningkatkan kepatuhan para pengguna jalan dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sebagai upaya kami dalam rangka mengefisienkan semua kendaraan dalam melintasi kawasan titik 0 km terkait dengan tujuan kami agar semua jenis kendaraan bisa mengakses jalan titik 0 km, disatu sisi Pemerintah Kota juga telah meningkatkan kelancaran akses pengguna jalan dengan meningkatkan keamanan lalu lintas yang melibatkan beberapa Polantas disisi selatan titik 0 km untuk selalu mengawasi dan mengatur akses penggunaan kendaraan baik roda dua dan roda empat yang selanjutnya Dinas PU-ESDM juga terlibat secara tidak langsung terkait dengan kondisi aksesibilitas lalu lintas di titik 0 km tersebut.”*



Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan pembangunan konstruksi titik 0 km memiliki hasil (*outcome*) yaitu semua kendaraan dapat menggunakannya.

Sedangkan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM tahun 2016 pada sasaran strategis yaitu meningkatnya aksesibilitas jalan di wilayah provinsi yang didalamnya juga meliputi pembangunan konstruksi titik 0 km diketahui telah mencapai kriteria penilaian realisasi keberhasilan sebesar 105,09 % (*sangat tinggi*).

### 5.2.3 Hasil (*Outcome*) Konstruksi Perpustakaan Grahatama

Perpustakaan merupakan sarana edukasi bagi masyarakat khususnya bagi pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan pasal 1 UU No 43 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka. Salah satu perpustakaan umum yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Grhatama Pustaka BPAD DIY yang beralamat di Jl. Raya Janti, Banguntapan Bantul.

Grhatama Pustaka diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada tanggal 21 Desember 2015 di lahan seluas 2,4 hektar. Salah satu tujuan didirikannya Grhatama Pustaka adalah untuk memberikan alternatif area publik yang mengedepankan fungsi keilmuan, pendidikan dan wahana rekreatif. Pembangunan Grhatama Pustaka sangat kental dengan nuansa budaya Jawa dimana filosofi kesempurnaan hidup orang Jawa tercermin dalam desain arsitektur empat minaret yaitu Prakoso, Wulung, Wangi, dan Agung. Drajat tertinggi kesempurnaan hidup orang Jawa tersebut dapat diraih melalui perpustakaan yang menyimpan koleksi berbagai macam pengetahuan. Untuk mengetahui *outcome* dari revitalisasi kawasan titik 0 km akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

### 5.2.1 Manfaat Bagi Publik

#### a. Bertambahnya Khasanah Arsip

Arsip memiliki arti yang sangat penting bagi sebuah lembaga, dan hal itu menjadikan arsip harus diselamatkan karena informasi yang terekam dalam arsip banyak menyimpan berbagai informasi penting tentang memori kolektif bangsa atau lembaga yang dapat dijadikan sebagai bahan bukti pertanggungjawaban di masa kini atau mendatang.

Arsip menjadi bukti otentik mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kelembagaan yang merupakan bagian dari kehidupan

berkebangsaan. Oleh karena itu arsip yang tersimpan di lembaga kearsipan baik pusat atau daerah dan lembaga-lembaga/instansi-instansi pemerintahan harus dikelola dengan baik melalui pemeliharaan dan perawatan yang tepat sehingga keberadaan arsip dapat dipertahankan selamanya mengikuti daur hidup arsip.

Peneliti dalam menganalisis hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi Perpustakaan Grahata terkait dengan manfaat bagi publik yaitu bertambahnya khasanah arsip mendasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) yaitu Ibu Agnes Riyanti D, SH yang ter kutip di bawah ini:

*“Menurut Ibu, apakah setelah pembangunan konstruksi perpustakaan terealisasi, khasanah arsip di perpustakaan dapat bertambah?”*

*“Setelah pembangunan konstruksi perpustakaan, kami melihat bahwa terjadi penambahan khasanah arsip berdasarkan penelusuran tim pelaksana kami serta aktifitas serta kegiatan akuisisi yang dilakukan pada sejumlah instansi penemirah dan non pemerintah di lingkungan PEMDA DIY, Kabupaten maupun Kota dimana pada beberapa area tersebut diketahui menggunakan beberapa arsip yang ada di bebrapa perpustakaan ini sebagai sarana dalam mengembangkan manajemen operasional pada masing-masing instasnsi tersebut dengan jumlah penambahan 57,06% dari jumlah arsip sebelumnya. Hal ini berarti bahwa khasanah arsip kami memiliki perbendaharaan serta fungsi manfaat yang efisien untuk publik.”*

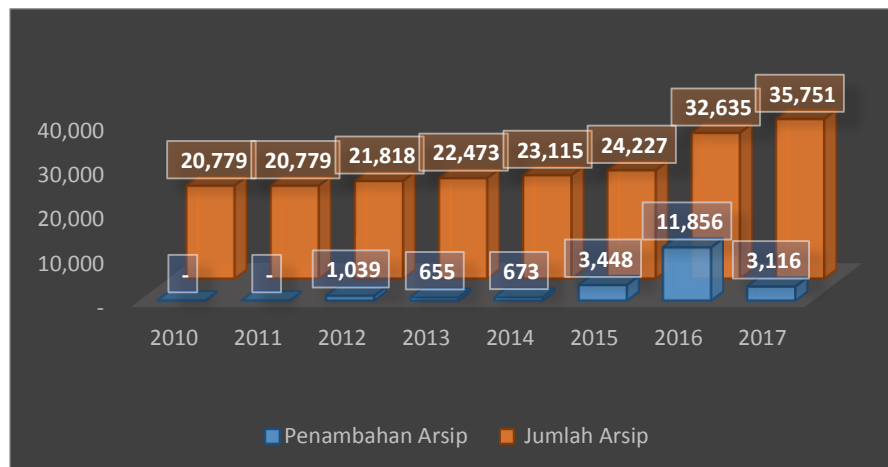
*“Apakah Ibu selaku Kepala Sub Bagian BPAD telah mendokumentasikan terkait degan bertambahnya khasanah arsip pada LAKIP BPAD?”*

*“semua kondisi pertambahan khasanah arsip yang ada dalam perpustakaan ini selalu kami catat atau dokumentasikan dalam LAKIP BPAD.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi BPAD tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan konstruksi perpustakaan Grahatama memiliki hasil (*outcome*) yaitu manfaat bagi publik dengan bertambahnya khasanah arsip dari yang sudah ada.

Sedangkan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) tahun 2016 pada sasaran strategis yaitu meningkatnya jumlah khasanah arsip diketahui telah mencapai target karena realisasi keberhasilan sebesar 380,40% yang berarti *sangat tinggi*. Peningkatan jumlah khasanah arsip tersebut terperinci dalam grafik di bawah ini:

Gambar 5.2 Grafik Penambahan Jumlah Arsip di Perpustakaan Grahatama Tahun 2010-2017



Sumber: Olah Data LAKIP BPAD Tahun 2017

Berdasarkan grafik di atas, jumlah arsip yang berada di Perpustakaan Grahatama pada tahun 2010 adalah sebanyak 20.779 arsip sedangkan setelah selesai pembangunan perpustakaan Grahatama terjadi peningkatan jumlah arsip pada tahun 2016 sebanyak 32.635 arsip dan tahun 2017 sebanyak 35.751 arsip sehingga pembangunan konstruksi tersebut memiliki dampak positif bagi peningkatan referensi kearsipan.

b. Bertambahnya Pemanfaatan Arsip sebagai Sumber Informasi

Arsip atau dokumen dapat menjadi salah satu sumber data, informasi dan pengetahuan. karena “Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” (Pasal 1 UURI No. 43 Tahun 2009)

Peneliti dalam menganalisis hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi Perpustakaan Grahatama terkait dengan manfaat bagi publik yaitu bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi mendasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) yaitu Ibu Agnes Riyanti D, SH yang ter kutip di bawah ini:

*“Berdasarkan survei yang Ibu lakukan, apakah setelah konstruksi pembangunan perpustakaan Grahata selesai terjadi penambahan pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi bagi publik?”*

*“Dengan dibangunnya Perpustakaan Grahata yang baru, kami melihat bahwa pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi mengalami peningkatan karena kami telah menggabungkan seluruh arsip yang berasal dari BPAD sebelumnya dengan seluruh arsip yang berada di Puro Pakualaman dan Kraton Yogyakarta pada ruang kearsipan di Perpustakaan Grahata. Sehingga pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi makin meningkat terlebih lagi kami melakukan program promosi pengarsipan ke media masa serta ruang eksibisi secara teratur kepada publik.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi BPAD tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan konstruksi perpustakaan Grahata memiliki hasil (*outcome*) yaitu manfaat bagi publik dengan bertambahnya pemanfaatan jumlah arsip sebagai sumber informasi.

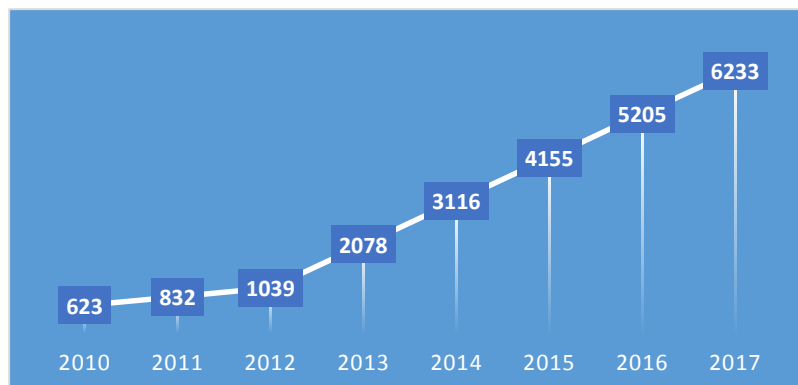
Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pemustaka atau pengunjung perpustakaan yakni Muhammad Hamdan Mukafi terkait dengan pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi seperti yang ter kutip di bawah ini :

*“Menurut anda, apakah semua literatur yang disediakan di perpustakaan ini dapat anda gunakan dalam menambah informasi ”*  
*“Literatur yang disediakan di Perpustakaan Grahata sangat saya rasakan sebagai media untuk menambah informasi sekaligus sebagai referensi bagi semua kalangan atau publik“.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengunjung perpustakaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan konstruksi perpustakaan Grahatama memiliki hasil (*outcome*) yaitu manfaat bagi publik dengan bertambahnya pemanfaatan jumlah arsip sebagai sumber informasi.

Sedangkan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) tahun 2016 pada sasaran strategis yaitu meningkatnya jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi diketahui telah mencapai kriteria penilaian realisasi keberhasilan sebesar 83,50% (*sangat tinggi*). Peningkatan jumlah pemanfaat arsip terperinci pada grafik dibawah ini:

Gambar 5.3 Grafik Jumlah Pemanfaatan Arsip Perpustakaan Grahatama Tahun 2010-2017



Sumber: Olah Data LAKIP BPAD Tahun 2017

Berdasarkan grafik di atas, jumlah pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi yang berada di Perpustakaan Grahatama pada tahun 2010 adalah

sebanyak 623 arsip sedangkan setelah selesai pembangunan perpustakaan Grahatama terjadi peningkatan jumlah arsip pada tahun 2016 sebanyak 5.205 arsip dan tahun 2017 sebanyak 6.233 arsip sehingga pembangunan konstruksi tersebut memiliki dampak positif bagi sumber informasi publik.

### c. Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Perpustakaan sebagai sarana pendidikan hendaknya memiliki manfaat bagi penggunaannya. Selain itu kehadiran perpustakaan diharapkan mampu meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan yang berarti bahwa minat baca masyarakat juga meningkat, seperti yang kita ketahui bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah.

Peneliti dalam menganalisis hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi Perpustakaan Grahatama terkait dengan manfaat bagi publik yaitu Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan mendasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) yaitu Ibu Agnes Riyanti D, SH yang ter kutip di bawah ini:

*“Apakah pembangunan konstruksi Perpustakaan Grahatama memiliki dampak yaitu bertambahnya jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan?”*

*“berdasarkan buku laporan kunjungan di Perpustakaan Grahatama, jumlah kartu keanggotaan pemustaka, dan laporan kunjungan di area perpustakaan keliling serta area pojok baca, kami memiliki*

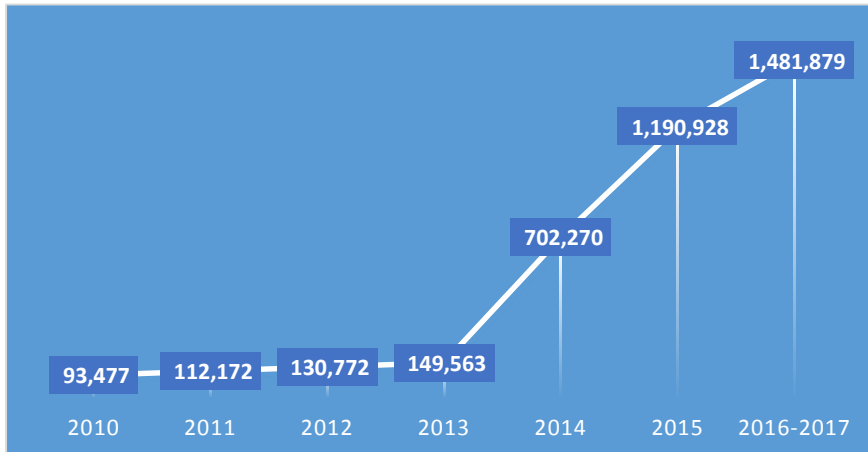


*data bahwa jumlah pemustaka yang menggunakan fasilitas media dari perpustakaan mengalami peningkatan sebesar 38,63% dari jumlah pemustaka sebelumnya yang berarti bahwa jumlah pemustaka total hingga akhir 2017 sebesar 926.174 orang dari sebelumnya yaitu 849.747 orang sehingga kami menyimpulkan bahwa pembangunan konstruksi Grahatama memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung pada aspek jumlah pemustaka.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi BPAD tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan konstruksi perpustakaan Grahatama memiliki hasil (*outcome*) yaitu meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan.

Sedangkan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) tahun 2016 pada sasaran strategis yaitu peningkatan jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan diketahui telah mencapai target karena realisasi keberhasilan sebesar 99,09 % yang berarti *sangat tinggi*. Jumlah pengunjung perpustakaan Grahatama mengalami peningkatan setelah proyek pembangunan selesai, hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 5.4 Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan Grahatama Tahun 2010-2017



Sumber: Olah Data LAKIP BPAD Tahun 2017

Berdasarkan grafik di atas, jumlah pengunjung di Perpustakaan Grahatama pada tahun 2010 adalah sebanyak 93.447 orang sedangkan setelah selesai pembangunan perpustakaan Grahatama terjadi peningkatan jumlah pengunjung pada tahun 2016 sampai tahun 2017 sebanyak arsip sehingga pembangunan konstruksi tersebut memiliki dampak positif 1.481.879 orang.

Dampak negatif dari pembangunan perpustakaan Grahatama adalah berkurangnya ruang hijau sehingga menimbulkan polusi udara karena pada saat sebelum dibangunnya perpustakaan Grahatama, ruang hijau sangat terbentang luas di area pembangunan konstruksi dan pada saat pembebasan lahan, pihak pengembang harus membebaskan ruang hijau tersebut.

### 5.2.3.2 Kesejahteraan

Peneliti dalam menganalisis hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi perpustakaan Grahatama terkait dengan kesejahteraan yaitu dalam meningkatkan pendapatan UMKM berdasarkan pada hasil wawancara dengan salah satu pelaku UMKM makanan yaitu Ibu Arrum disekitar perpustakaan Grahatama terkait dengan peningkatan pendapatan hasil UMKM yang terkuip di bawah ini :

*“Apakah setelah dibangunnya perpustakaan Grahatama berdampak pada peningkatan penghasilan anda”*

*“Usaha makanan yang saya kelola mengalami peningkatan pendapatan terutama pada jam aktif perpustakaan antara jam 08.00-22.00 WIB karena jumlah pengunjung di perpustakaan tersebut semakin bertambah setiap harinya sehingga saya selalu menambah jumlah menu berupa makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh para pengunjung serta karyawan perpustakaan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arrum selaku pengusaha UMKM makanan maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan konstruksi perpustakaan Grahatama memiliki hasil (*outcome*) yaitu kesejahteraan berupa kenaikan hasil UMKM masyarakat terutama UMKM makanan dan minuman di sekitar perpustakaan.

Peneliti dalam menganalisis hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi perpustakaan Grahatama terkait dengan kesejahteraan yaitu dalam meningkatkan pendapatan UMKM juga menggunakan data pendukung atau sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul tahun 2010 dan 2015 dalam

rangka menilai laju pertumbuhan UMKM sebelum dan sesudah pembangunan konstruksi Perpustakaan Grahatama yang terperinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.8 Laju Pertumbuhan UMKM Sebelum dan Sesudah Pembangunan Konstruksi Perpustakaan Grahatama

No	Konstruksi	Tahun		Laju Pertumbuhan UMKM (Rp)	Laju Pertumbuhan UMKM (%)
		2010	2016		
1	Perpustakaan Grahatama	Rp.1.169988	Rp.1.943.455	Rp. 773.464	(1.6%)

Sumber: BPS Kabupaten Bantul Tahun 2010 dan 2016 Data telah diolah

Berdasarkan BPS Kota Yogyakarta tahun 2010 dinyatakan bahwa sebelum pembangunan perpustakaan Grahatama memiliki nilai UMKM sebesar Rp. 1.169988 sedangkan setelah pembangunan Perpustakaan Grahatama nilai UMKM bertambah menjadi Rp. 1.943.455 pada tahun 2015. Hal ini berarti bahwa pembangunan konstruksi Perpustakaan Grahatama memiliki dampak positif bagi laju pertumbuhan nilai UMKM sebesar Rp. 773.464 (1.6%) dalam jangka waktu 5 tahun.

### 5.2.3.3 Keadilan

Grahatama Pustaka merupakan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Lasa (2009) perpustakaan

umum adalah perpustakaan yang disediakan oleh pemerintah daerah guna menunjang sarana pembelajaran bagi masyarakat luas tanpa mengenal suku, ras, agama dan bangsa. Pengertian ini sejalan dengan prinsip keadilan dimana keadilan merupakan sesuatu yang memang harus diterapkan dalam seluruh lapisan kehidupan.

Peneliti dalam menganalisis hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi perpustakaan Grahatama terkait dengan keadilan yaitu mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya, berdasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) yaitu Ibu Agnes Riyanti D, SH yang ter kutip di bawah ini:

*“Bagaimana prinsip keadilan yang ibu ketahui setelah dibangunnya konstruksi Perpustakaan Grahatama bagi publik?”*

*“Tentunya kami berfokus pada visi misi kami dalam mewujudkan perpustakaan bagi publik untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki minat belajar tinggi sehingga dapat membentuk karakter serta memiliki jiwa budaya. Hal ini kami usahakan dengan menyajikan berbagai informasi yang diperlukan oleh publik dengan berbasis teknologi informasi serta pendokumentasian berupa arsip yang diselenggarakan di berbagai lokasi sehingga masyarakat atau pengunjung perpustakaan dapat mencari, memilih serta memanfaatkan semua prasarana tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di satu sisi kami juga memberikan fasilitas penunjang seperti wifi dan koleksi buku tambahan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi BPAD tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan

pembangunan Perpustakaan Grahatama memiliki hasil (*outcome*) yaitu dapat mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya.

Berdasarkan beberapa uraian tentang indikator hasil (*outcome*) terkait dengan pembangunan konstruksi *Fly Over* Jombor, Titik 0 Km dan Peprustakaan Grahatama, peneliti menyimpulkan bahwa:

- a. Pembangunan konstruksi *Fly Over* Jombor memiliki dampak bagi publik dimana tingkat kemacetan dan polusi dapat berkurang serta jarak tempuh bagi seluruh pengendara menjadi lebih efektif. Pembangunan konstruksi *Fly Over* Jombor juga memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat sekitar berupa peningkatkn hasil UMKM dan juga memberikan manfaat keadilan yaitu memberikan aksesibilitas jalan yang layak bagi publik.
- b. Pembangunan konstruksi Titik 0 Km memiliki hasil yang positif bagi publik berupa menurunnya tingkat kemacetan dan angka kecelakaan serta menciptakan sanitasi yang bersih di kawasan sekitar titik 0 km. Pembangunan konstruksi titik 0 km juga memiliki dampak kesejahteraan bagi masyarakat yaitu meningkatnya jumlah penghasilan dari usaha UMKM serta memiliki asas keadilan berupa kesetaraan hak para pengendara dalam menggunakan jalan titik 0 km.
- c. Pembangunan konstruksi Perpustakaan Grahatama diketahui juga mempunyai manfaat positif bagi publik berupa meningkatnya khasanah serta jumlah kearsipan yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah

pengunjung perpustakaan. Manfaat positif dari pembangunan konstruksi Perpustakaan Grahatama juga dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan UMKM masyarakat sekitar sebagai perwujudan kesejahteraan serta memberikan kontribusi yang diharapkan oleh pemerintah DIY berupa pembentukan karakter semua masyarakat yang berbudaya sebagai realisasi dari aspek keadilan.

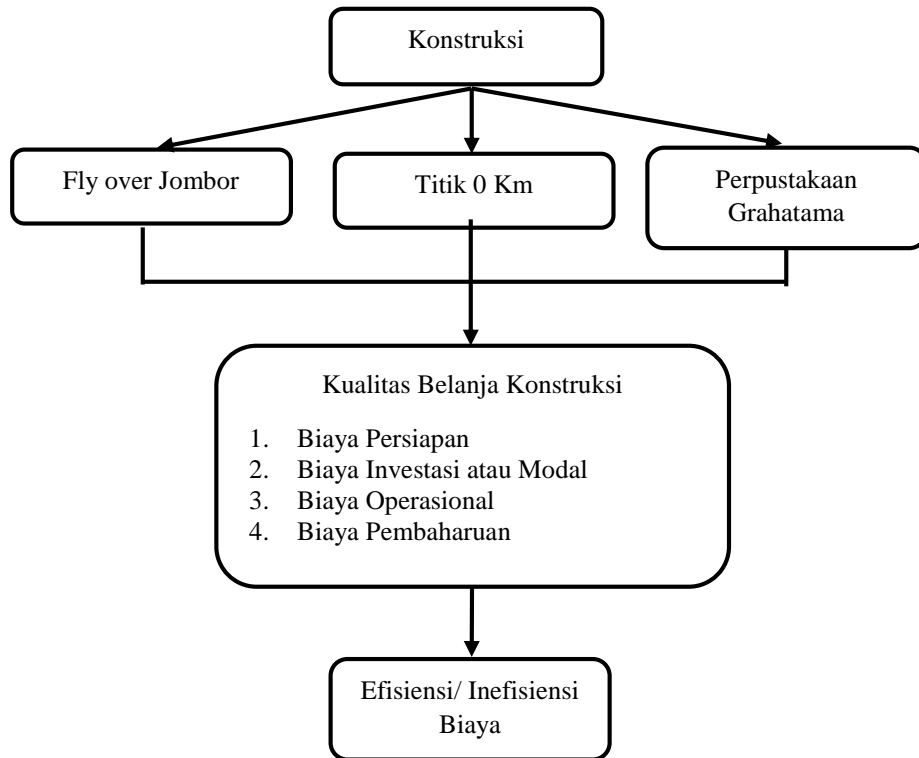
### **5.3 Analisis Efisiensi Biaya Pekerjaan Konstruksi**

Rencana anggaran biaya merupakan bagian yang paling penting dalam melakukan pembangunan konstruksi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi dengan sumber daya dan metode yang digunakan dalam pembangunan konstruksi (Kurniawan: 2008).

Selain itu, dalam membuat perencanaan biaya juga harus memiliki perhitungan yang matang agar terjadi efisiensi dan efektifitas biaya. Kurniawan (2008) juga menyebutkan bahwa efisiensi pada intinya adalah perbandingan terbalik atau rasionalitas antara hasil yang diperoleh atau output dengan kegiatan yang dilakukan serta sumber-sumber dan waktu yang dipergunakan atau input. Sedangkan efektifitas diukur dari jumlah hasil keluaran (*output*) yang sesuai harapan/layak (*output layak*) dari seluruh hasil keluaran (*output*). Pembahasan terkait dengan efisiensi biaya konstruksi pada Pembangunan Proyek *Fly over*

Jombor, Titik 0 km dan Perpustakaan Grahata dipaparkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 5.5 Hubungan Biaya Konstruksi



Selanjutnya analisis tentang efisiensi biaya konstruksi pada pembangunan proyek *Fly over Jombor*, Titik 0 km dan Perpustakaan Grahata dipaparkan dalam pembahasan di bawah ini:



### 5.3.1 Efisiensi Biaya Pekerjaan Konstruksi *Fly Over* Jombor

Peneliti dalam menganalisis efisiensi biaya pekerjaan konstruksi *fly over* Jombor menggunakan data rekapitulasi pekerjaan konstruksi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pelaksana pembangunan terkait dengan biaya persiapan atau biaya modal; operasional yang meliputi biaya pembangunan drainase, pengerasan jalan, struktur serta pekerjaan harian; dan biaya pembaruan berupa biaya peresmian bangunan.

Keseluruhan biaya tersebut digunakan oleh peneliti dalam rangka melakukan penghitungan efisiensi biaya yang dinilai dari ketepatan biaya target awal dan biaya realisasi pembangunan konstruksi *fly over* serta ketepatan waktu pembangunan konstruksi tersebut.

Keseluruhan biaya yang digunakan dalam pembangunan konstruksi *fly over* Jombor berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia yang dialokasikan ke pemerintah DIY dalam rangka perwujudan keotonomian DIY dalam bentuk penganggaran dana keistimewaan untuk keperluan publik. Dana yang berasal dari APBN tersebut diserahkan oleh pemerintah DIY kepada Dinas PU-ESDM DIY sebagai penyelenggara pembangunan konstruksi *fly over* yang selanjutnya dimandatkan ke PPK selaku penanggungjawab pembangunan konstruksi. Rincian biaya dalam pembangunan konstruksi *fly over* sebagaimana yang dimaksud di atas terperinci dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.9 Rincian Biaya Konstruksi *Fly Over* Jombor

No. Divisi	Umum	Rencana Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)	Realisasi Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)	Efisiensi Anggaran	
1	Biaya Persiapan (Modal)	5.213.104.000	5.213.104.000	-	
2	Biaya Operasional				
	a	Drainase	18.000.000.000	18.000.000.000	-
	b	Pengerasan Jalan	77.600.130.000	77.600.130.000	-
	c	Struktur	14.500.000.000	14.500.000.000	-
3	Biaya Pembaruan				
	a	Peresmian konstruksi	110.000.000	110.000.000	-
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1.000.000.000	1.000.000.000	-	
JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN		<b>118.423.234.000</b>	<b>118.423.234.000</b>	-	

Sumber: DPA Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DIY Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya target awal yang meliputi biaya Investasi atau Modal (biaya target pekerjaan konstruksi) atau biaya persiapan serta biaya operasional dan biaya pembaruan sebesar Rp.118.423.234.000 (seratus delapan belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) memiliki keselarasan atau kesinergisan dengan biaya pelaksanaan atau operasional pembangunan konstruksi sebesar Rp.118.423.234.000. Hal ini berarti bahwa biaya awal target dapat digunakan secara efisien oleh PT Adhi Karya dalam melaksanakan pembangunan *fly over* Jombor yang merupakan kontraktor pembangunan oleh Dinas PUP-ESDM sebagai perusahaan pengembang pemenang tender.

Pembangunan konstruksi *fly over* Jombor dalam pelaksanaannya juga telah memenuhi target waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dinas PU-ESDM dalam mentargetkan pembangunan konstruksi *fly over* oleh PT Adhi Karya yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2010 dan mencapai penyelesaiannya pada bulan Desember tahun 2014. Terkait dengan hal tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kordinator Lapangan PPK yaitu Pak Nur Badarudin mengenai waktu penyelenggaraan pembangunan sebagaimana yang terkuip dibawah ini:

*“Bagaimana terkait dengan waktu penyelenggaraan pembangunan konstruksi Jombor?”*

*“Pelaksanaan pembangunan konstruksi fly over Jombor telah memenuhi target waktu yang ditentukan dimana PT Adhi Karya telah memulai pembangunan konstruksi pada bulan Januari tahun 2010 dan mencapai penyelesaiannya pada tahun bulan Desember tahun 2014 sehingga PT Adhi karya dinilai mampu mengalokasikan biaya modal awal pada biaya operasional pembangunan tanpa mengalami pembengkakan biaya yang berarti bahwa biaya yang dikeluarkan oleh dinas PU-ESDM dapat diselenggarakan dengan baik oleh PT Adhi Karya selama melaksanakan pembangunan konstruksi fly over Jombor.”*

Berdasarkan rincian biaya pembangunan konstruksi *fly over* Jombor dan wawancara dengan Kepala Koordinator Lapangan PPK tersebut, disimpulkan bahwa terdapat efisiensi biaya pembangunan konstruksi *fly over* Jombor dengan ketentuan ketepatan penggunaan anggaran serta ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan.

### 5.3.2 Efisiensi Biaya Pekerjaan Konstruksi Titik 0 Km

Analisis mengenai efisiensi biaya pekerjaan konstruksi titik 0 km dalam penelitian ini menggunakan data rekapitulasi pekerjaan konstruksi dari bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM terkait dengan beberapa biaya utama dalam pembangunan konstruksi titik 0 km yang meliputi biaya persiapan atau biaya modal; operasional yang meliputi biaya pembangunan drainase, pengerasan jalan, struktur serta pekerjaan harian; dan biaya pembaruan berupa biaya peresmian konstruksi.

Beberapa biaya utama tersebut digunakan oleh peneliti dalam rangka melakukan analisis efisiensi biaya yang digunakan dalam pembangunan konstruksi dimana biaya utama dikatakan efisien apabila memenuhi ketepatan antara biaya target awal dan biaya realisasi pembangunan konstruksi serta memenuhi target ketepatan waktu pembangunan konstruksi.

Keseluruhan biaya yang digunakan dalam pembangunan konstruksi titik 0 km berasal dari Dana Keistimewaan DIY yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM yang selanjutnya dikelola oleh bidang Bina Marga selaku pelaksana proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM yang bertanggung jawab dalam pengerjaan pembuatan dan pemeliharaan jalan serta jembatan di provinsi yang selanjutnya pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh PT. Soyuren sebagai perusahaan pemenang tender. Rincian biaya dalam pembangunan konstruksi titik 0 km sebagaimana yang dimaksud di atas terperinci dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.10 Rincian Biaya Konstruksi Titik 0 Km

No. Divisi	Umum	Rencana Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)	Realisasi Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)	Efisiensi Anggaran
1	Biaya Persiapan (Modal)	151,613,390	103,270,500	
2	Biaya Operasional			
	<b>A</b>	Drainase	3,331,120,079	-
	<b>B</b>	Pengerasan Jalan	528.671.902	121,764,241
	<b>C</b>	Struktur	439,391,774	-
	<b>D</b>	Pekerjaan Harian	-	11,357,554
3	Biaya Pembaruan			
	<b>A</b>	Peresmian konstruksi	-	-
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1,270,330,309	446,345,231	
<b>JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN</b>		<b>13,973,633,403</b>	<b>4,909,797,543</b>	<b>9,063,835,860</b>

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya target awal yang meliputi biaya Investasi atau Modal (biaya target pekerjaan konstruksi) atau biaya persiapan serta biaya operasional dan biaya pembaruan sebesar Rp. 13,973,633,403 (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah). Sedangkan biaya total realisasi pengerjaan konstruksi diketahui sebesar Rp. 4,909,797,543 sehingga bidang Bina Marga memiliki sisa biaya operasional sebesar Rp. 9,063,835,860.

Selanjutnya oleh pihak bidang Bina Marga biaya tersebut dikoordinasikan kembali pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM sebagai laporan

pembiayaan efisiensi. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM melakukan koordinasi kepada pemerintah provinsi terkait dengan anggaran biaya sisa dari pengerjaan konstruksi titik 0 km yang berasal dari Dana Keistimewaan DIY. Hal ini berarti bahwa biaya awal target dapat digunakan secara efisien oleh PT Soyuren dalam melaksanakan pembangunan titik 0 km dengan ketentuan pembiayaan operasional di bawah target awal.

Pembangunan konstruksi titik 0 km dalam pelaksanaannya juga terealisasi lebih awal dari target waktu pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dinas PU-ESDM dalam menargetkan pembangunan konstruksi titik 0 km oleh PT Soyuren yang dilaksanakan pada bulan September 2015 hingga Februari Januari 2016 namun dapat terealisasi pada penyelesaiannya pada bulan Desember 2015. Terkait dengan hal tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan bidang Bina Marga bagian keuangan yaitu Bapak Kusno Wibowo ST. Msi terkait dengan waktu penyelenggaraan pembangunan titik 0 km sebagaimana yang ter kutip dibawah ini:

*“Bagaimana waktu penyelenggaraan pembangunan konstruksi titik 0 km ?”*

*“Realisasi pembangunan konstruksi titik 0 km dapat dikatakan sangat efektif karena dapat diselesaikan lebih awal dari target waktu yang ditentukan yaitu pada bulan September 2015 hingga Februari Januari 2016 namun PT Soyuren telah berhasil menyelesaikan pembangunan konstruksi titik 0 km pada bulan Desember 2016 dan PT Soyuren dinilai mampu mengalokasikan biaya modal awal pada biaya operasional pembangunan dengan sangat efisien yaitu memiliki biaya sisa operasional sebesar Rp. 9,063,835,860.”*

Berdasarkan rincian biaya pembangunan konstruksi titik 0 km dan wawancara dengan bidang Bina Marga bagian keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi biaya pembangunan konstruksi titik 0 km dengan ketentuan ketepatan penggunaan anggaran yaitu kurang dari rencana anggaran awal serta efisiensi waktu pelaksanaan yaitu kurang dari waktu perencanaan pelaksanaan pembangunan yang ditentukan.

### 5.3.3 Efisiensi Biaya Pekerjaan Konstruksi Grahata Pustaka

Analisis efisiensi biaya pada pekerjaan konstruksi Grahata Pustaka di Kabupaten Bantul Yogyakarta menggunakan data berupa biaya perencanaan dan realisasi yang meliputi biaya modal, operasional, pembaruan dan PPN pada tahun 2011 hingga 2015 dimana semua biaya tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DIY yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DIY kepada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah (BPAD) Yogyakarta untuk merealisasikan pembangunan perpustakaan Grahata sebesar Rp.56.522.730.161.

Salah satu perusahaan pengembang yang dipercaya melaksanakan pembangunan konstruksi adalah PT. Ampuh Sejahtera dimana perusahaan tersebut diketahui telah membangun konstruksi perpustakaan Grahata pada tahun 2011 namun mengalami kemacetan di akhir tahun 2012 dikarenakan pengelolaan Sumber Daya Manusia pada proyek tersebut yang kurang mampu

mengalokasikan dana dalam pelaksanaan pembangunan perpustakaan Grahata.

Berdasarkan pengamatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Yogyakarta pada BPAD melalui proyek yang dikerjakan oleh PT. Ampuh Sejahtera, diketahui bahwa PT. Ampuh Sejahtera telah melakukan penggelapan sejumlah anggaran konstruksi dari BPAD sebesar 2,3 milyar selama pengerjaan proyek tersebut. Hal ini menimbulkan kerugian finansial bagi BPAD dan kemudian masalah tersebut berlanjut pada meja hijau yaitu di Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara perdata yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DIY karena kasus tersebut dipandang telah merugikan APBD DIY dan pemerintah provinsi diketahui juga telah mengeluarkan biaya untuk persidangan.

Selanjutnya BPAD juga mengalami kerugian waktu pelaksanaan pembangunan perpustakaan Grahata yaitu pembangunan perpustakaan Grahata mengalami pemberhentian sementara pada awal tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2013 yang dikarenakan pihak BPAD menggunakan waktu tersebut untuk menaikkan kasus penggelapan anggaran oleh PT. Ampuh Sejahtera ke meja hijau. Berikut adalah rincian biaya awal perencanaan dan biaya realisasi pembangunan perpustakaan Grahata yang dikerjakan oleh PT. Ampuh Sejahtera dari tahun 2011 hingga 2012 dalam tampilan tabel di bawah ini:



Tabel 5.11 Biaya Rencana dan Realisasi Pembangunan Grahatama Pustaka Tahun 2011-2012

No. Divisi	Umum	Rencana Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)	Realisasi Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Biaya Persiapan (Modal)	23.758.706.910	10.951.940.000
2	Biaya Operasional		
	<b>A</b> Pekerjaan Tanah dan Pasir	113.451.464	
	<b>B</b> Pekerjaan pasangan dan plesteran	1.982.257.773	
	<b>C</b> Struktur/ Beton	25.381.949.009	25.081.949.009
	<b>A</b> Pekerjaan Harian		
3	Pembaruan		
	Peresmian konstruksi		
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	5.286.365.005	
<b>JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN</b>		<b>56.522.730.161</b>	<b>36.033.889.009</b>

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) 2011-2012

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa biaya yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi DIY pada awal proyek pengerjaan perpustakaan Grahatama oleh PT. Ampuh Sejahtera namun belum terealisasi sepenuhnya yaitu pada biaya operasional yang meliputi biaya pekerjaan tanah dan pasir, pekerjaan pasangan dan plesteran, struktur atau beton serta pekerjaan harian, dimana biaya tersebut diketahui merupakan biaya penggelapan oleh PT. Ampuh Sejahtera sebesar 2,3 milyar yang meliputi biaya pekerjaan tanah dan pasir sebesar Rp. 113.451.464, pasangan dan plesteran sebesar Rp. 1.982.257.773 serta biaya struktur dan beton sebesar Rp. 300.000.000 yang digelapkan dari biaya awal untuk struktur dan beton sebesar Rp. 25.381.949.009.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu. Agnes Riyanti, D. SH selaku Kepala Sub Bagian Program, Data dan Teknologi Informasi terkait dengan kasus penggelapan anggaran proyek konstruksi perpustakaan Grahatama oleh PT. Ampuh Sejahtera seperti yang ter kutip di bawah ini :

*“Bagaimana mengenai kasus penggelapan anggaran operasional yang dilakukan oleh PT. Ampuh Sejahtera terkait dengan pembangunan konstruksi Perpustakaan Grahatama ?”*

*“Berdasarkan temuan dari BPK DIY melalui inspektorat terkait dengan proyek konstruksi Perpustakaan Grahatama yang mana anggaran dari pembangunan perpustakaan tersebut berasal dari APBD DIY, menyatakan bahwa PT Ampuh Sejahtera telah melakukan penggelapan dana operasional sebesar 2,3 Miliar pada biaya Pekerjaan Tanah dan Pasir, Pekerjaan pasangan dan plesteran serta biaya Struktur/Beton dengan rincian biaya penggelapan yaitu biaya pekerjaan tanah dan pasir sebesar Rp. 113.451.464, pasangan dan plesteran sebesar Rp. 1.982.257.773 serta biaya struktur dan beton sebesar Rp. 300.000.000 yang digelapkan dari biaya awal untuk struktur dan beton sebesar Rp. 25.381.949.009. Selanjutnya BPK DIY melaporkan hal tersebut pada Pemerintah Provinsi untuk dilanjutkan ke meja hijau di Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka putusan peradilan dari kasus penggelapan tersebut dan Pemerintah Provinsi diketahui juga membiayai peradilan tersebut hingga putusan keluar.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan konstruksi Grahatama mengalami kemunduran waktu pelaksanaan sebagaimana yang ditentukan pada awal pelaksanaan yaitu proyek konstruksi Perpustakaan Grahatama dimulai pada tahun 2011 hingga tahun 2012 namun karena kasus penggelapan yang dilakukan oleh PT. Ampuh Sejahtera berdampak pada kelangsungan pembangunan yaitu proyek konstruksi Perpustakaan Grahatama berhenti sementara pada akhir tahun 2012, kemudian BPK

memutuskan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk menaikkan kasus tersebut ke meja hijau di Pengadilan Negeri Bantul dan proyek pembangunan konstruksi Grahata ma mengalami pemnberhentian sementara.

Di satu sisi, terdapat pengurangan dana dari APBD sebesar 2,3 Miliar dari hasil penggelapan oleh PT Ampuh Sejahtera. Hal ini berarti bahwa efisiensi biaya pembangunan konstruksi Grahata ma belum terselenggara dengan baik terkait dengan ketidaksinergisan antara biaya awal pengerjaan proyek dengan biaya operasional serta ketidaktepatan waktu pengerjaan dari awal target.

Pada awal tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2013 Pemerintah Provinsi melalui BPAD menyatakan untuk memberhentikan sementara pengerjaan konstruksi Grahata ma karena pada rentang waktu tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Provinsi dalam mengkasuskan PT Ampuh Sejahtera di Pengadilan negeri Bantul. Selanjutnya Pemerintah Provinsi menyatakan untuk memulai kembali pengerjaan konstruksi perpustakaan grahata ma pada pertengahan tahun 2013 hingga akhir tahun 2015 dengan perusahaan pengembang yang baru serta pengaturan anggaran ulang yang mana biaya pembangunan diperoleh dari APBD 2013 hingga 2015.

Pada pertengahan tahun 2013 BPAD diketahui memulai melanjutkan proyek pembangunan konstruksi perpustakaan Grahata ma dengan biaya persiapan (modal), Operasional, pembaruan dan PPN pada program pembukuan yang baru sebagaimana yang terperinci dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.12 Biaya Realisasi Pembangunan Grahatama Pustaka Tahun 2013-2015

No. Divisi	Umum	Realisasi Biaya Konstruksi Tahun 2013-2015
1	Persiapan (Modal)	37.500.000
2	Operasional	
	<b>A</b> Pekerjaan Tanah dan Pasir	28.071.675.000
	<b>B</b> Pekerjaan pasangan dan plesteran	31.690.750.000
	<b>C</b> Struktur/ Beton	30.190.750.000
3	Pembaruan	
	<b>A</b> Peresmian konstruksi	500.000.000
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	3.119.075.000
<b>TOTAL</b>		<b>93.609.750.000</b>

Sumber Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2013-2015

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi kembali mengeluarkan biaya pembangunan konstruksi Grahatama dengan anggaran pembaruan untuk pertengahan tahun 2013 hingga akhir tahun 2015 dimana Pemerintah Provinsi menunjuk PT Titimatra Tujutama untuk mengerjakan tahap 2 proyek konstruksi Grahatama.

Pemerintah Provinsi mengajukan anggaran pembaruan pembangunan konstruksi grahatama tahap 2 pada APBD sebesar Rp.93.609.750.000 dengan rincian biaya Persiapan (Modal) sebesar Rp. 37.500.000, biaya operasional sebesar Rp.89.953.175.000 serta biaya pembaruan berupa peresmian konstruksi sebesar Rp. 500.000.000.

Berdasarkan anggaran awal yang diajukan pada APBD untuk pembangunan konstruksi Grahatama adalah sebesar Rp.56.522.730.161 namun

pada realisasi anggaran total hingga selesainya proyek konstruksi perpustakaan tersebut diketahui sebesar Rp. 93.609.750.000 sehingga pemerintah provinsi mengalami kerugian sebesar Rp. 37.087.019.839. Hal ini berarti bahwa pekerjaan proyek konstruksi perpustakaan Grahatama mengalami pembengkakan anggaran dari anggaran awal yang telah ditentukan sehingga pemerintah provinsi melalui BPAD belum menyelenggarakan efisiensi biaya secara akuntabel dengan adanya pembengkakan biaya konstruksi. Di satu sisi, pemerintah Provinsi melalui BPAD juga belum menerapkan efisiensi waktu dengan adanya kemunduran waktu pengerjaan konstruksi Perpustakaan Grahatama. Efisiensi dan hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi yang dibangun oleh pemerintah DIY yang telah di paparkan di atas terperinci pada tabel berikut ini:

Tabel 5.13 Komparasi Efisiensi Biaya dan Hasil (*Outcome*) Pekerjaan Konstruksi di DIY

	<b>Fly Over Jombor</b>	<b>Jalan Titik 0 Km</b>	<b>Perpustakaan Grahutama</b>
Manfaat Publik	Mengurangi tingkat dan Biaya Kemacetan	Mengurangi Tingkat kemacetan	Bertambahnya jumlah khasanah arsip
	Mengurangi tingkat dan biaya polusi udara	Mengurangi Angka Kecelakaan	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi
	Kefeektifan jarak tempuh	Meningkatnya kelayakan sanitasi	Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan
Kerugian Bagi Publik	Renggangnya interaksi antar warga	Lingkungan sekitar titik 0 km menjadi kurang bersih	berkurangnya ruang hijau
	Kebisingan Suara Degradasi lingkungan di sekitar <i>flyo ver</i>		
Kesejahteraan	Meningkatnya pendapatan UMKM	Meningkatnya pendapatan UMKM	Meningkatnya pendapatan UMKM
Keadilan	Meningkatnya aksesibilitas jalan	Semua kendaraan dapat menggunakan	Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya
Efisiensi Biaya	Total Belanja Pelaksanaan Konstruksi <b>sama dengan</b> Biaya Perencanaan	Total Belanja Pelaksanaan Konstruksi <b>kurang dari</b> Biaya Perencanaan	Total Belanja Pelaksanaan Konstruksi <b>lebih dari</b> Biaya Perencanaan
Stakeholders	PT Adhi Karya	PT Soyuren	PT Ampuh Sejahtera
	Dinas PUP-ESDM DIY	Dinas PUP-ESDM DIY	PT Titimatra Tujutama BPAD DIY